

PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Grace¹ dan Herdita Fauzia Safitri²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 63 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang akuntansi keuangan.

Kata Kunci: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit, Nilai Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit.

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of the proportion of independent commissioners, the frequency of board of commissioners' meetings, the size of the audit committee, and the frequency of audit committee meetings on firm value. The population of this study is the property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2013-2015. The sampling technique used was purposive sampling method, in order to obtain as many as 63 samples. This study uses a descriptive analysis method using the SPSS 23 program. The results show that the proportion of independent commissioners, the frequency of board of commissioners' meetings, and the frequency of audit committee meetings have no effect on firm value. While the size of the audit committee has a significant effect on firm value. The results of this study are expected to contribute to the field of financial accounting.

Keywords: Audit Committee Meeting Frequency, Audit Committee Size, Board of Commissioners Meeting Frequency, Company Value and Proportion of Independent Commissioners

PENDAHULUAN

Secara umum, perusahaan adalah lembaga yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang disebut sebagai pemilik (*owner*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Salah satu hal terpenting bagi pemegang saham (*shareholder*) adalah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang maksimal (*profit motive*) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut bagi keuntungan para pemegang saham (Djalil, 2000). Menurut Salvatore (2005) tujuan perusahaan salah satunya adalah meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi, berpotensi memiliki nilai pengembalian yang tinggi yang akan diberikan dari perusahaan kepada para pemegang saham. Hal tersebut dapat meyakinkan para pemegang saham untuk tetap menanamkan sahamnya serta dapat menarik minat para investor lainnya untuk bersedia menanamkan sahamnya ke perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan merupakan isu utama bagi *stakeholders* perusahaan, dikarenakan nilai perusahaan menggambarkan kondisi perusahaan,

untuk memprediksi eksistensi perusahaan di masa depan dan kinerja perusahaan di periode yang lampau. Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. Kemampuan perusahaan dalam membayar dividen setara dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki laba yang besar, maka kemampuan membayar dividen juga besar dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Matono dan Agus Hartijo, 2005:3). Menurut Husnan (2002), nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan apabila perusahaan tersebut dijual.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan seperti penjualan, biaya, penggunaan aset, sumber pendanaan dan indikator non-finansial. Pada abad ke-19 dan ke-20, indikator finansial menjadi fokus utama perusahaan, sedangkan pada akhir abad ke-20 perusahaan mulai memperhatikan indikator non-finansial seiring dengan berkembangnya ilmu penelitian pada bidang ekonomi dan bisnis seperti *auditing*, *internal control*, dan *corporate governance*. Konsep *corporate governance* muncul ketika Adolf Augustus Berle dan Gardiner C. Means menerbitkan “*The Modern Corporation*

and Private Property” pada tahun 1932, kemudian Eugene Fama dan Michael Jensen tahun 1983 dalam tulisan “*Separation of Ownership and Control*” dengan *Principal Agency Theory*. Isu *corporate governance* semakin berkembang pesat ketika terjadinya beberapa peristiwa ekonomi seperti Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997, kejatuhan perusahaan Enron pada tahun 2001 dan Worldcom tahun 2002. Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* dimulai setelah Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 terjadi menyebabkan isu mengenai *good corporate governance* semakin mengemuka (Giri, 2006). Peristiwa-peristiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya *Good Corporate Governance*.

Menurut Ishaq (2009), *Corporate governance* dapat dilihat dari *board independence* (dewan komisaris independen), dan *board intensity* atau *meetings* (frekuensi rapat dewan komisaris perusahaan). Berdasarkan keputusan direksi Bursa Efek Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan *good corporate governance* perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit.

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Tujuan utama komite audit adalah untuk meningkatkan pengelolaan suatu organisasi (Magrane, 2009). Komite audit yang efektif dapat diukur melalui independensi, aktivitas, dan kompetensi. Aktivitas komite audit dapat dilihat melalui jumlah rapat yang dilakukan (Brick, 2010).

Dalam pengelolaan nilai perusahaan, komisaris independen menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Komisaris Independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (Susanti, 2010; Suharti, 2011; dan Syafrinaldi, 2015). Semakin banyak komisaris independen yang dimiliki perusahaan, maka pengawasan atas pengelolaan perusahaan akan semakin baik. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Herawaty (2008) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Faktor selanjutnya ialah frekuensi rapat dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan Yatim dkk. (2006) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi frekuensi

rapat dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruben (2012) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Komite audit merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian Arifianti (2010) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Salkon (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor lainnya adalah frekuensi rapat komite audit. Penelitian Prasetyo (2014) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian Ruben (2012) menunjukkan hasil bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memiliki rumusan apakah proporsi dewan

komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap nilai perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *agent* dengan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Yang disebut *principal* adalah investor, pemilik, dan pemegang saham, sedangkan yang dimaksud dengan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Berdasarkan teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer sulit tercipta keselarasan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang saling bertentangan. Menurut Gusti (2012) manajer sebagai manusia kemungkinan besar bertindak *opportunistic* (mengutamakan pribadinya). Konflik kepentingan yang kemungkinan terjadi antara *principal*

dan *agent* dikarenakan *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal* yang kemudian memicu biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk mengawasi perilaku *agent* dalam mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu cara untuk meminimalisasi konflik keagenan adalah dengan *corporate governance*, yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi hubungan antara dewan komisaris, manajemen perusahaan dan investor. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai nilai jual dari perusahaan itu saat sedang beroperasi. Jika nilai jualnya

berada di atas nilai likuiditas, manajemen perusahaan sudah menjalankan fungsinya dengan baik (Sartono, 2010). Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan/atau pemegang saham (Wahidahwati, 2002). Menurut Fama (1978) nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya, harga saham merupakan persepsi investor terhadap perusahaan. Untuk mengetahui nilai pasar perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio keuangan. Menurut Sukamulja (2004) salah satu rasio untuk mengukur nilai perusahaan adalah *Tobin's Q* yang dikembangkan oleh James Tobin tahun 1967. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti misalnya terjadinya perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi (Claessens dan Fan, 2003 dalam Sukamulja, 2004); hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Onwioduokit, 2002 dalam Sukamulja, 2004); hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dalam akuisisi (Gompers, 2003 dalam

Sukamulja, 2004) dan kebijakan pendanaan, dividen, dan kompensasi (Imala, 2002 dalam Sukamulja, 2004).

Corporate Governance

Corporate governance menurut *Cadbury Report* (1992) dalam Tjager dkk. (2003) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan masalah keagenan. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2000), *Corporate governance* dapat meminimalkan *agency cost*, meminimalkan *cost of capital*, dan meningkatkan nilai saham perusahaan serta mengangkat citra perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik akan memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh *return* atas investasi

dengan wajar, tepat, dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal yang rendah akan mendorong para investor melakukan investasi di perusahaan tersebut. Banyaknya investor yang tertarik akan meningkatkan permintaan investasi, sehingga harga saham perusahaan akan meningkat yang merupakan rantai pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran *stakeholder* yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak dengan independen (KNKG, 2006). Tujuan utama adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang

persetujuan atau keputusan yang diperlukan. Komisaris independen dapat mendukung *good corporate governance* dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan (Yovie, 2015).

Dalam peraturan Bursa Efek Jakarta tanggal 1 Juli 2000, dikemukakan bahwa perusahaan tercatat harus mempunyai komisaris independen dengan jumlah minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Hermiyetti & Evita, 2011 dalam Yovie, 2015). Menurut Ishaq (2009) ukuran dewan komisaris independen diukur melalui perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris dalam perusahaan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan (Yovie, 2015). Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan jumlah pertemuan yang diadakan oleh anggota dewan komisaris

perusahaan selama satu tahun. Sebagian besar perhatian regulator dan pemegang saham pada dewan komisaris didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas dewan komisaris bisa meningkatkan nilai para pemegang saham.

Conger dkk. (1998), mengemukakan bahwa aktivitas dewan komisaris yang dilihat dari frekuensi rapat yang diadakan merupakan sumber daya yang penting untuk meningkatkan efektivitas dewan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akses informasi juga akan semakin merata diantara sesama komisaris sehingga keputusan akan semakin baik dan meningkatkan kinerja perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu sumber informasi yang nantinya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dewan komisaris.

Ukuran Komite Audit

Komite audit Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) (2006) adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Toha

(2004) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

Menurut KNKG (2006), salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Untuk menerapkan *good corporate governance* peran komite audit pada perusahaan sangat penting (Chrisdianto, 2013). Peran komite audit menurut Elbanon (2009) menyatakan bahwa efektivitas dari komite audit yang merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* adalah untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa Komite Audit memiliki wewenang

dalam mengakses secara penuh, bebas, dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal. Menurut Chrisdianto (2013) dalam rangka melaksanakan tugasnya, komite audit hendaknya melakukan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit adalah satu-satunya sinyal kuantitatif yang terjadi secara umum yang menunjukkan kerajinan dan kepatuhan dari komite audit (Raghuandan & Dasaratha, 2007). Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.5 tahun 2004, komite audit harus melakukan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, mengatur rapat, pelaporan dan masa tugas komite audit sebagai berikut:

- 1) Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan.
- 2) Rapat komite audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota.
- 3) Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota komite yang hadir.
- 4) Rapat dipimpin oleh ketua komite audit atau anggota komite audit yang paling senior, apabila ketua komite audit berhalangan hadir.
- 5) Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.

Hipotesis

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa komisaris

independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memang benar-benar berada dalam posisi netral dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kepentingan dengan komisaris lainnya atau direksi atau pihak yang dapat mengurangi posisi independensinya. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan oleh Mac Avoy dan Millstein (1999) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen dapat melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Shakir (2005) dan Susanti (2010) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan

Frekuensi rapat dewan komisaris

direksi adalah jumlah pertemuan dewan komisaris dalam perusahaan selama satu tahun. Penelitian Ishaq (2009) menunjukkan adanya hubungan positif antara frekuensi rapat dewan komisaris atau *meetings* dengan nilai perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian Susanti (2010) juga menyatakan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah pertemuan yang dilakukan dewan dalam perusahaan, akan menghasilkan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik, serta mempermudah kinerja perusahaan dan pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan koordinasi agar kinerja perusahaan menjadi efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran komite audit adalah jumlah komite audit dalam perusahaan. Selain dewan komisaris, komite audit

juga memiliki peran dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014, menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal.

Hasil penelitian Lee (2007) menunjukkan bahwa komite audit memberikan pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *Tobin's Q*. Selain itu, Forker (1992) juga berpendapat bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan pengendalian internal dan menjadi perangkat yang efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Ukuran komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit adalah satu-satunya sinyal kuantitatif yang terjadi secara umum yang

menunjukkan kerajinan dan kepatuhan dari komite audit (Raghunandan & Dasaratha, 2007). Pihak badan swasta dan *Securities Exchange Commissions* (SEC) telah menekankan kebutuhan dari frekuensi rapat untuk komite audit. Abott dkk. (2000) mengemukakan aktivitas komite audit yang dilihat dari frekuensi rapat yang dilakukan dapat mengurangi *fraud* dalam proses pelaporan keuangan sehingga akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan frekuensi rapat komite audit dipercaya dapat memberikan pengawasan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja perusahaan (Raghunandan & Dasaratha, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan di Indonesia yang termasuk dalam golongan perusahaan *property* dan *real estate* sesuai dengan kategori yang dikembangkan oleh BEI yang tercantum dalam *IDX Fact Book* dan tidak mengalami *delisting* selama tahun 2013–2015.
- 2) Perusahaan *property* dan *real estate* yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2013-2015.
- 3) Perusahaan *property* dan *real estate* yang memiliki data variabel yang akan diteliti dalam laporan keuangan tahunan selama tahun 2013-2015.

Berdasarkan kriteria tersebut, selama periode penelitian tahun 2013-2015 terdapat sebanyak 43 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI dan tidak mengalami *delisting*, sebanyak 3 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara

konsisten, dan sebanyak 19 perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap. Maka, diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan dalam satu periode, sehingga jumlah sampel selama tiga tahun periode adalah 63 perusahaan.

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yaitu *annual report* perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder yang dipublikasikan oleh BEI dan situs resmi perusahaan yang terpilih sebagai sampel.

Definisi Operasional

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai nilai jual dari perusahaan itu saat sedang beroperasi. Jika nilai jualnya berada di atas nilai likuiditas, manajemen perusahaan sudah menjalankan fungsinya dengan baik (Sartono, 2010). Menurut Fama (1978) nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya, harga saham merupakan persepsi investor terhadap perusahaan. Untuk mengetahui nilai pasar perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio keuangan. Menurut Sukamulja (2004) salah satu rasio yang

paling baik untuk mengukur nilai perusahaan adalah *Tobin's Q* yang dikembangkan oleh James Tobin tahun 1967. Rasio ini memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan serta seluruh aset perusahaan. Amelitta (2008) menyebutkan bahwa nilai perusahaan, diukur menggunakan *Tobin's Q*, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Nilai perusahaan} = \frac{\text{Nilai Ekuitas Pasar} + \text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

Proporsi Komisaris Independen

Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Komisaris independen dapat mendukung *good corporate governance* dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan (Hermiyetti & Evita, 2011).

Dalam peraturan Bursa Efek Jakarta tanggal 1 Juli 2000, dikemukakan bahwa perusahaan tercatat harus mempunyai komisaris independen dengan jumlah minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris

(Hermiyetti & Evita, 2011). Ishaq (2009) menyatakan ukuran dewan komisaris independen diukur melalui perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris dalam perusahaan, dinyatakan dalam bentuk persentase yang diformulasikan sebagai berikut:

$$BDin = \frac{\sum \text{dewan komisaris independen}}{\sum \text{dewan komisaris perusahaan}}$$

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan (Yovie, 2015). Semakin banyak jumlah pertemuan yang dilakukan dewan dalam perusahaan, akan menghasilkan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik, serta mempermudah kinerja dewan perusahaan dan pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan koordinasi agar terciptanya suatu keefektifan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Ishaq, 2009).

Frekuensi rapat dewan komisaris dapat diukur dengan menghitung jumlah rapat dewan yang diadakan dewan

komisaris dalam perusahaan selama satu tahun, diformulasikan sebagai berikut (Ishaq, 2009):

$$MEETDK = \text{jumlah rapat dewan komisaris selama satu tahun}$$

Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah komite audit yang ada pada perusahaan tersebut. Peran komite audit menurut Elbanon (2009) adalah efektivitas dari komite audit yang merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* adalah untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Menurut Zarkasyi (2008) komite audit bertugas membantu komisaris dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit dalam penelitian ini, diformulasikan sebagai berikut (Arifianti, 2010):

$$ACom = \sum \text{anggota komite audit}$$

Frekuensi Rapat Komite Audit

Menurut Raghunandan dan Dasaratha (2007) frekuensi rapat komite audit adalah satu-satunya sinyal

kuantitatif yang terjadi secara umum yang menunjukkan kerajinan dan kepatuhan dari komite audit. Jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dapat mengurangi *fraud* dalam proses pelaporan keuangan sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin banyak jumlah rapat yang diadakan, maka ada peningkatan komunikasi antara direksi dan auditor eksternal. Hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan adanya masalah dalam pelaporan keuangan, kecurangan, penggantian auditor, dan penyajian ulang. Frekuensi rapat komite audit dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Brick (2010), diformulasikan sebagai berikut:

MEETKA = jumlah rapat komite audit selama satu tahun

Metode Analisis Data

Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda, karena dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel

dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2005). Tahapan-tahapan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Persamaan model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$NP = \alpha + \beta_1 \text{BDin} + \beta_2 \text{MEETDK} + \beta_3 \text{ACom} + \beta_4 \text{MEETKA} + \varepsilon$$

Dimana:

NP = Nilai Perusahaan

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi dari Variabel Independen

BDin = Proporsi dewan komisaris independen

MEETDK = Frekuensi rapat dewan komisaris

ACom = Ukuran komite audit

MEETKA = Frekuensi rapat komite audit

ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel penelitian (Ghozali, 2005). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NP	63	.22	3.96	1.3556	.82753
BDin	63	.30	.75	.3951	.10106
MEETDK	63	2.00	12.00	5.2857	2.66052
Acom	63	3.00	4.00	3.0476	.21467
MEETKA	63	2.00	17.00	5.9683	3.67190
Valid N (listwise)	63				

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebesar 63 sampel. Tabel di atas menunjukkan nilai perusahaan (NP) yang diproksikan dengan rasio Tobin's Q memiliki nilai minimum sebesar 0,22 yaitu pada PT Greenwood Sejahtera di tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 3,96 yaitu pada PT Fortune Mate Indonesia di tahun 2015. Nilai rata-rata sebesar 1,3556 dengan standar deviasi 0,82753. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata nilai perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia pada periode tahun 2013-2015 adalah *overvalued* karena lebih dari 1.

Proporsi Dewan Komisaris Independen (BDin) memperoleh nilai minimum dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris adalah sebesar 0,30 atau 30% yaitu pada PT Gowa Makassar Tourism Development di tahun 2015 dan nilai maksimum dewan komisaris independen

dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris sebesar 0,75 atau 75% yaitu pada PT Lippo Karawaci di tahun 2013. Diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,3951 atau 39% dengan standar deviasi 0,10106. Hal ini memperlihatkan bahwa rata-rata dan minimum banyaknya suatu komisaris independen adalah sebesar 39,51% dan 30%, yang berarti perusahaan sudah memenuhi ketentuan standar minimum komisaris independen sebesar 30% dari jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (MEETDK) menghasilkan nilai minimum sebesar 2 kali rapat dewan komisaris dalam setahun yaitu pada PT Bekasi Asri Pemula di tahun 2013, 2014, dan 2015, PT Alam Sutera Realty di tahun 2013 dan 2015, PT Greenwood Sejahtera di tahun 2013 dan 2014, PT Metropolitan Kentjana dan PT Metropolitan Land di tahun 2013 dan 2014. Nilai maksimum sebesar 12 kali

rapat dewan komisaris dalam setahun yaitu pada PT Duta Anggada Realty di tahun 2014 dan 2015. Nilai rata-rata sebesar 5,2857 dengan standar deviasi 2,66052. Hal ini berarti bahwa rata-rata dewan komisaris mengadakan rapat sebanyak 5 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dan kebutuhan dari masing-masing dewan komisaris untuk menyelenggarakan rapat dewan komisaris tersebut.

Ukuran Komite Audit (Acom) memiliki nilai minimum sebesar 3 orang komite audit yaitu pada hampir semua perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini dan nilai maksimum sebesar 4 atau 4 orang komite audit yaitu pada PT Metropolitan Kentjana di tahun 2013, 2014 dan 2015. Pada pengujian ini juga diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,0476 atau 3 orang komite audit dengan standar deviasi sebesar 0,21467. Ukuran komite audit ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan dalam menentukan jumlah komite audit.

Sehingga komite audit yang dimiliki masing-masing perusahaan pun berbeda.

Frekuensi Rapat Komite Audit (MEETKA) memperoleh nilai minimum sebesar 2 kali rapat komite audit dalam setahun yaitu pada PT Bekasi Asri Pemula di tahun 2013, 2014, dan 2015. Nilai maksimum sebesar 17 kali rapat komite audit diadakan dalam setahun yaitu pada PT Intiland Development di tahun 2014. Diperoleh nilai rata-rata sebesar 5,9683 dengan standar deviasi 3,67190. Hal ini berarti bahwa rata-rata dewan komite audit mengadakan rapat adalah sebanyak 6 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dan kebutuhan dari masing-masing komite audit suatu perusahaan untuk menyelenggarakan rapat komite audit tersebut.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		63
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.64544307
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.161
	<i>Positive</i>	.161
	<i>Negative</i>	-.065
<i>Test Statistic</i>		1.279
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.076

Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan besarnya *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,076 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga asumsi normalitas dapat dinyatakan terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel

independen dalam suatu model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF masing-masing variabel < 10 dan *Tolerance* masing-masing variabel > 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
1 (Constant)			
BDin	.930	1.075	Tidak terjadi multikolinearitas
MEETDK	.719	1.390	Tidak terjadi multikolinearitas
Acom	.946	1.058	Tidak terjadi multikolinearitas
MEETKA	.727	1.376	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji terhadap sampel dikatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai $dW > dU$. Sesuai dengan pengujian, sampel yang digunakan berjumlah 63 dan jumlah variabel independen 4 maka menghasilkan

$dU:1,69321$. Dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini bahwa besar dW adalah 2,281. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas pada sampel dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.626	.392	.350	.66733	2.281

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *scatterplot*. Berdasarkan hasil uji *scatterplot* menunjukkan bahwa pada data, titik-titik tersebut terlihat tidak terdapat pola yang jelas serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi didapatkan nilai *adjusted R-*

Square sebesar 0,350. Hal ini berarti bahwa sebesar 35,0% variasi di dalam nilai perusahaan (NP) dapat dijelaskan oleh variabel komisaris independen (BDin), rapat dewan komisaris (MEETDK), komite audit (Acom), dan rapat komite audit (MEETKA). Sebanyak 65,0% lainnya adalah faktor-faktor lainnya yaitu variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil Uji t

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t sebesar 2,00172. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Model	Understandardized residual		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
			Beta		
1 (Constant)	-5.075	1.377		-3.685	.001
BDin	-.650	.870	-.079	-.747	.458
MEETDK	.031	.038	.101	.837	.406
Acom	2.230	.406	.578	5.492	.000
MEETKA	-.046	.207	-.204	-1.694	.096

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$NP = -5,075 - 0,650 \text{ BDin} + 0,031 \text{ MEETDK} + 2,230 \text{ Acom} - 0,046 \text{ MEETKA}$$

Koefisien konstanta sebesar -5,075 bernilai negatif, hal ini dapat diartikan bahwa nilai perusahaan (NP) akan bernilai -5,075 apabila masing-masing variabel proporsi dewan komisaris independen (BDin), rapat dewan komisaris (MEETDK), komite audit

(Acom), dan rapat komite audit (MEETKA) bernilai 0.

Variabel proporsi dewan komisaris independen (BDin) memiliki koefisien regresi sebesar -0,650. Jika dilihat dari tabel nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,458 > 0,05$, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel proporsi dewan komisaris independen mempunyai t hitung 0,747 lebih kecil dari t tabel=2,00172. Maka dapat disimpulkan variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan.

Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (MEETDK) memiliki koefisien regresi sebesar 0,031. Pada tabel nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,406 > 0,05$, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel frekuensi rapat dewan komisaris memiliki t hitung 0,837 lebih kecil dari t tabel=2,00172. Maka dapat disimpulkan variabel frekuensi rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan

Variabel ukuran komite audit (Acom) memiliki koefisien regresi sebesar 2,230. Jika dilihat dari tabel nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas

0,05, atau nilai $0,000 < 0,05$, maka H1 diterima dan h0 ditolak. Variabel ukuran komite audit mempunyai t hitung 5,4927 lebih besar dari t tabel=2,00172. Maka dapat disimpulkan variabel ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan.

Variabel frekuensi rapat komite audit (MEETKA) memiliki koefisien regresi sebesar -0,046. Jika dilihat dari tabel nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,096 > 0,05$, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel frekuensi rapat komite audit mempunyai t hitung yakni 1,694 lebih kecil dari t tabel=2,00172. Maka variabel frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris independen kurang objektif dalam melakukan pengawasan terhadap dewan direksi, sehingga kinerja dewan direksi kurang begitu efektif dan efisien yang

akhirnya akan berdampak kepada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pengangkatan dewan komisaris independen hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep 305/BEJ/07- 2004 dan ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% belum cukup tinggi untuk mendominasi kebijakan yang diambil oleh komisaris independen, sehingga peran komisaris independen dalam melakukan pengawasan belum cukup efektif. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Shakir (2005) dan Susanti (2010) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Frekuensi rapat dewan komisaris dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan. Frekuensi rapat dilakukan hanya sebagai formalitas dan tidak membahas rinci, sehingga rapat tidak efektif dalam membahas perkembangan perusahaan atau informasi-informasi terbaru mengenai perusahaan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka

terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan. Menurut Bhagat (2000), rapat dewan komisaris tidak meningkatkan kinerja perusahaan apabila proporsi dewan komisaris independen tinggi dalam dewan komisaris. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ishaq (2009) dan Susanti (2010) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran komite audit pada penelitian ini terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan. Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang dimiliki masing-masing perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit menjadi sebuah tolak ukur atas keefektifan dari kinerja komite audit dalam meningkatkan nilai perusahaan. Komite audit telah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu sebagai badan yang membantu dewan komisaris dalam bidang keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Forker (1992) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit dapat

meningkatkan pengendalian internal dan menjadi perangkat pemantauan yang efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Zarkasyi (2008) komite audit bertugas membantu komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, yaitu pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Frekuensi rapat komite audit dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan. Rapat komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah rapat resmi yang diselenggarakan oleh komite audit dalam periode satu tahun. Dalam penelitian ini keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit itu sendiri yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, jadi bukan karena seberapa sering komite audit mengadakan rapat. Sejalan dengan hasil penelitian Stewart dan Kent (2006), Hu (2008), dan Mohiuddin dkk. (2010) bahwa efektivitas komite audit yang diukur dari frekuensi rapat yang diadakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kualitas pelaporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya bahwa semakin besar jumlah komite audit akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam menjalankan kewajibannya, hal tersebut dapat menyebabkan nilai perusahaan menjadi tinggi. Sebaliknya, semakin kecil ukuran komite audit akan menyebabkan nilai perusahaan menjadi rendah, karena komite audit tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Sementara proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ditemukan selama penelitian, maka terdapat saran bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk

menambahkan variabel independen yang lebih bervariasi sehingga dapat mengetahui faktor-faktor utama yang memengaruhi nilai perusahaan seperti struktur kepemilikan. Selain itu, disarankan menggunakan objek penelitian yang lebih luas, menambah sampel, dan periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisdianto, B. (2013). Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Aktual Vol 2, No. 1*.
- Djalil, S. A. (2000). Good Corporate Governance. Makalah disampaikan pada *Seminar Corporate Governance*. di Universitas Sumatera Utara.
- Fama, E.F. (1978). The Effects of a Firm's Investment and Financing Decisions on The Welfare of Its Security Holders. *The Modern Theory of Corporate Finance*. Vol 68. No.3, 22-38.
- FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance*. April 26, 2016.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (3rd ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2, Nov, 2008, hal: 97-108.
- Hermiyetti & Evita, M. (2011). The Influence of Good Corporate Governance Mechanism on Earnings Management: Empirical Study in Indonesian Stock Exchange Listed Company for Periods of 2006-2010. *June 26, 2016. Universitas Bakrie*.
- Husnan, Suad. (2002). *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi ke tiga. Yogyakarta: AMP YKPN
- IICG. (2000). *Indonesian Institute for Corporate Governance*.
- Ishaaq, Z. (2009). Corporate governance, ownership structure, cash holdings, and firm value on the Ghana Stock Exchange. *Journal of Risk Finance* Vol. 10 No.5, 488- 499
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No.4, pp 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. (2006). *Pedoman Umum Corporate Governance*.
- Salvatore, Dominick. (2005). *Ekonomi Manajerial Dalam Perekonomian Global*. Buku 1 Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Shleifer, A dan R.W. Vishny. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*. 52 (2), 737-783.
- Sukamulja, S. (2004). *Good Corporate Governance* di Sektor Keuangan: Dampak *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan. *Vol.8 (1)*. Hal 1-25
- Susanti, R. (2010). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan. *Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Tjager, I N., dkk. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Wahidahwati. (2002). Kepemilikan Manajerial dan *Agency Conflicts*: Analisis Persamaan Simultan Non-Linear dari Kepemilikan Manajerial,

Penerimaan Risiko (*Risk Taking*),
Kebijakan Hutang, Kebijakan
Dividen. *Simposium Nasional*
Akuntansi V: 601-625